

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN *BUDGET RATCHETING* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTA DI PROVINSI BALI)

Ni Luh Putu Dita Silviani¹, I Made Pradana Adiputra²

^{1,2} Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali, Indonesia

e-mail: ¹| dita.silviani@undiksha.ac.id, ²| adiputra@undiksha.ac.id,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal serta untuk mengetahui pengaruh *budget ratcheting* dalam memoderasi hubungan masing – masing variabel bebas ke alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan pemda dalam bentuk APBD dan LRA dengan rentang waktu 6 tahun (2016-2021). Penelitian ini menggunakan analisis data berupa regresi linier berjenjang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Selanjutnya *budget ratcheting* memiliki sifat moderasi memperkuat pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal serta pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal

Kata kunci: penganggaran; alokasi belanja modal; pendapatan asli daerah; dana perimbangan; *budget ratcheting*

Abstract

This study aims to determine the effect of regional original income and balancing funds on the allocation of capital expenditure and to determine the effect of budget ratcheting in moderating the relationship of each independent variable to the allocation of capital expenditure in district/city regional governments in the Province of Bali. The type of data in this research uses secondary data in the form of regional government financial reports in the form of APBD and LRA with a span of 6 years (2016-2021). This study uses data analysis in the form of tiered linear regression. The results of this study indicate that regional original income and balance funds have a significant positive effect on capital expenditure allocation. Furthermore, budget ratcheting has moderation properties, strengthening the influence of PAD on the allocation of capital expenditures and the effect of balancing funds on the allocation of capital expenditures.

Keywords: *budgeting; capital expenditure allocation; regional original income; balancing funds; budget ratcheting*

1. Pendahuluan

Diberlakukannya otonomi daerah ini menjadikan daerah memiliki kemandirian dalam mengelola aktivitas untuk pemenuhan kesejahteraan daerahnya termasuk kedalam aktivitas pengelolaan keuangan daerah yang kemudian dikenal dengan desentralisasi fiskal. Diberlakukannya desentralisasi fiskal sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan daerah untuk lebih berkembang melalui perencanaan dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah terkait.

Belanja modal merupakan belanja pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran serta akan menambah aset daerah. Penetapan alokasi belanja modal dalam anggaran daerah secara menyeluruh merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. yang dimana jika dilihat dari konteks pengelolaan keuangan daerah, pengalokasian belanja modal berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang karena akan memunculkan pembiayaan jangka panjang dalam bentuk biaya pemeliharaan (Nufus & Andra Asmara, 2017) Menurut Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa jumlah belanja modal yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya sebesar 29% dari total belanja daerah. Namun, pada pelaksanaannya, komposisi belanja modal dalam anggaran yang disusun pemerintah memiliki porsi yang relatif kecil. Selama ini komposisi belanja daerah dalam anggaran lebih banyak didominasi oleh belanja rutin yang relatif kurang produktif (Nurhayati, 2018)

Hal ini juga didukung oleh data keuangan yang disampaikan oleh Mneteri Keuangan RI dimana, realisasi belanja pemerintah daerah pada anggaran sampai dengan akhir Mei tahun 2022 didominasi oleh belanja pegawai yaitu gaji untuk ASN. Dimana dari realisasi sebesar Rp. 223 triliun, proporsi belanja gaji sebesar Rp. 113 triliun sedangkan proporsi belanja modal hanya Rp. 12 triliun. Realisasi belanja modal tahun 2022 ini mengalami penurunan sebesar 14% dari tahun 2021 yang realisasi hingga akhir Mei 2021 sebesar Rp. 14 triliun (Ulya & Kusdiana, 2022).

Pengalokasian belanja modal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah, yang dimana menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 disamping faktor besarnya pengeluaran belanja rutin, pengalokasian belanja modal juga dipengaruhi oleh besarnya sumber dana yang dimiliki pemerintah daerah. Penerimaan daerah untuk membiaya belanja modal terdiri atas Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Selain dari sumber penerimaan, alokasi belanja modal juga dipengaruhi oleh sistem penyusunan anggaran yang digunakan oleh pemerintah.

Weitzman et.al (1980) menyatakan bahwa dalam menyusun anggaran pemerintah cenderung menggunakan informasi varian anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pengalokasian anggaran tahun berikutnya. Penggunaan varian anggaran sebagai basis ini merupakan konteks yang menunjukkan bahwa dalam anggaran terdapat inkrementalisme atau bias perilaku oportunistik dalam perumusan anggaran dalam bentuk efek ratchet atau dikenal dengan budget ratcheting. Adanya budget ratcheting ini dapat dilihat dari kenaikan anggaran pada periode berikutnya sebagai respon negatif atas varian negatif anggaran periode sebelumnya Penyusunan anggaran satuan kerja selalu terkait akan motivasi dan celah incrementalism (Abdullah & Junita, 2016)

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi yang memiliki catatan APBD yang baik. Dimana APBD Provinsi Bali dari tahun ke tahun relative mengalami kenaikan. Pada sisi pendapatan daerah mengalami rata – rata peningkatan sebesar 5.5% per tahun dalam periode 2016-2020, dan pada sisi PAD mengalami peningkatan 2.4% pada periode yang sama. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali mengalami peningkatan yang mulanya sebesar 3.4 triliun pada tahun 2016 menjadi 3.8 triliun di tahun 2020. Namun pada aspek realisasi dari PAD menunjukkan angka 10-12% selama kurun waktu periode anggaran untuk melampaui target anggaran yang telah direncanakan. Kemudian di sisi dana perimbangan, besaran dana perimbangan dalam APBD Provinsi Bali mengalami rata – rata pertumbuhan sebesar 9.4% dalam kurun waktu 2016-2020. Yang dimana pada tahun 2016 besaran nilai dana perimbangan berjumlah Rp. 1,9 triliun naik menjadi Rp. 2,8 triliun di tahun 2020. Hal yang terjadi di komponen pendapatan pada APBD pemerintah Provinsi Bali mengindikasikan bahwa anggaran pemerintah di sisi pendapatan cenderung under forecast.

Kemudian pada sisi belanja modal dalam periode 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan. Dimana rata – rata pertumbuhan yaitu sebesar 1,5% per tahun dalam kurun waktu 2016-2020. Nilai belanja modal pada tahun 2016 sebesar Rp. 805 miliar naik menjadi 865 miliar di tahun 2020. Namun pada sisi realisasi, belanja modal cenderung mengalami fluktuasi di angka 53-94% dari anggaran yang telah disusun. Selain itu proporsi belanja modal dalam APBD Pemerintah Provinsi Bali tahun 2022 juga masih jauh dari proporsi yang dianjurkan oleh peraturan, dimana proporsi belanja modal hanya 14% dari belanja daerah yang

dianggarkan. Situasi ini mengindikasikan bahwa postur belanja di Provinsi Bali masih kurang sehat dan berpotensi kurang produktif.

Berdasarkan uraian latar belakang serta fenomena yang telah dijelaskan, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dengan merumuskan rumusan masalah yaitu; apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali, apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali, apakah *budget ratcheting* memperkuat pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali, serta apakah *budget ratcheting* memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Teori Keagenan

Teori keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang memodelkan proses kontrak antara dua orang atau lebih dan masing-masing pihak dalam kontrak berusaha untuk mencapai apa yang terbaik untuk dirinya (Scott, 2000). Hubungan teori ini dengan penelitian ini adalah, pemerintah daerah yang bertindak sebagai agen dalam melakukan penyusunan atau pengalokasian belanja modal dalam APBD dapat melihat dari kemampuan sumber daya yang ada baik yang dimiliki oleh daerahnya sendiri dalam bentuk pendapatan asli daerah ataupun yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang dimana pengalokasian tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau publik sebagai *principal*. Dimana dalam pengalokasian ini, pemerintah daerah sebagai pengalokasi juga sering dipengaruhi oleh sifat *self-interest*, *bounded rationality* dan *risk averse*. Hal ini yang kemudian, menjadikan anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah mengalami distorsi dan tidak mencerminkan alokasi pemenuhan sumber daya kepada masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Bastian (2006) anggaran merupakan paket pernyataan perkiraan penerimaan dan pengeluaran yang diestimasi akan terjadi pada periode selanjutnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut APBD) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 didefinisikan sebagai agenda atau rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang akan ditinjau dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD serta akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. APBD merupakan alat kebijakan utama bagi pemerintah daerah dalam bentuk satuan moneter guna pelaksanaan pelayanan publik. APBD terdiri dari beberapa komponen pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan.

Alokasi Belanja Modal

Menurut Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Secara sederhana belanja modal dapat diartikan sebagai pengeluaran atas suatu yang memiliki nilai guna dan masa yang lebih satu tahun yang dilakukan pemerintah daerah.

Dalam mengalokasikan anggaran belanja modal pemerintah daerah harus mampu mengelolanya dan mengoptimalkan sumber daya dengan baik karena melalui belanja modal pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan publik dan dalam rangka menghadapi desentralisasi fiskal (Nurarifah et al., 2022)

Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya

disebut PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Definisi lain dikemukakan oleh (V. F. Sari et al., 2021) yang menyatakan PAD sebagai semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber daya asli daerah melalui pungutan yang diatur oleh peraturan daerah. Komponen PAD berdasarkan Permendagri No 33 Tahun 2019, terbagi atas; (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan (4) Lain-Lain PAD Yang Sah.

Dana Perimbangan

Menurut UU No 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004, dana perimbangan tersusun atas komponen dana yang terdiri atas: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Budget Ratcheting

Upaya penggunaan informasi periode sebelumnya yang bersifat menguntungkan (favorable) sebagai dasar penentuan target pencapaian kerja periode berikutnya dikenal dengan istilah *ratchet efek* atau *ratcheting*. Dalam kaitannya dengan penganggaran, *ratchet efek* ini biasa disebut dengan *budget ratcheting*. Konsep *budget ratcheting* dapat memberikan makna bahwa adanya asimetri informasi tentang potensi bawahan diantara hubungan antara atasan dan bawahannya, sehingga atasan menggunakan kinerja sebelumnya sebagai dasar dalam penentuan dan pembaruan target kinerja di masa mendatang (Weitzman,1980).

Budget ratcheting diambil dari varian anggaran Pendapatan Daerah antara periode berjalan dengan periode sebelumnya, yang rumus perhitungannya sebagai berikut:

$$BR = B_t - B_{t-1} \dots\dots\dots (1)$$

Dengan keterangan B_t merupakan anggaran pendapatan daerah tahun berjalan, B_{t-1} adalah anggaran pendapatan daerah tahun sebelumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penelitian ini *budget ratcheting* dihitung menggunakan varian anggaran tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah adalah sumber penghasilan pemerintah daerah yang berasal dari daerahnya sendiri. Mengoptimalkan serta memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dapat menjadi salah satu upaya agar daerah memiliki kemandirian yang memadai dan lebih mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat (Setyarini dan Rustiyaningsih, 2021). Pada penelitian yang dilakukan oleh Setyarini dan Rustiyaningsih (2021), memperoleh hasil Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil yang diperoleh juga selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurdiwaty et al., 2017) yang menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal. Berdasarkan pemaparan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₁: Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Positif terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pembangunan daerah adalah salah satu kebutuhan daerah yang termasuk dalam klasifikasi belanja modal. Sehingga secara selaras belanja modal juga dipengaruhi oleh besarnya dana perimbangan yang diterima oleh daerah (Nufus & Andra Asmara, 2017) Penelitian yang dilakukan oleh (Malau et al., 2020), (Calen et al., 2019), (Nufus & Andra Asmara, 2017), dan (Nurdiwaty et al., 2017). juga menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, artinya kenaikan dana perimbangan maka akan searah dengan kenaikan belanja modal. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H₂: Dana Perimbangan Berpengaruh Positif terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengaruh *Budget Ratcheting* dalam Memoderasi Hubungan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Menurut Kim (2002), anggaran yang diusulkan kepala daerah didasarkan pada prioritas anggaran yang disesuaikan dengan tujuan jangka menengah pemerintah daerah, yang apabila disetujui oleh parlemen, akan didistribusikan pada awal tahun fiskal berikutnya. Setiap usulan anggaran mencakup dua hal, yakni perkiraan penerimaan dan estimasi pengeluaran. (Abdullah & Junita, 2016) menyatakan saat penggunaan informasi anggaran tahun sebelumnya digunakan dan dijadikan dasar atas acuan dalam penentuan target tahun berikutnya dapat disebut sebagai *budget ratcheting*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Anjeli & Mulyani, 2020), diketahui bahwa *budget ratcheting* memoderasi hubungan antara pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah namun hubungan yang ditunjukkan bersifat memperlemah. Pada penelitian (Abdullah & Junita, 2016) menyatakan dalam penelitiannya bahwa hubungan dari *budget ratcheting* memoderasi hubungan pendapatan sendiri dengan belanja daerah. (Nurhayati, 2018) menunjukkan hasil bahwa pengaruh *budget ratcheting* dalam memoderasi bersifat memperkuat hubungan antara pendapatan asli daerah dengan belanja daerah. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: *Budget Ratcheting* Memperkuat dalam Hubungan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal.

Pengaruh *Budget Ratcheting* dalam Memoderasi Hubungan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Modal

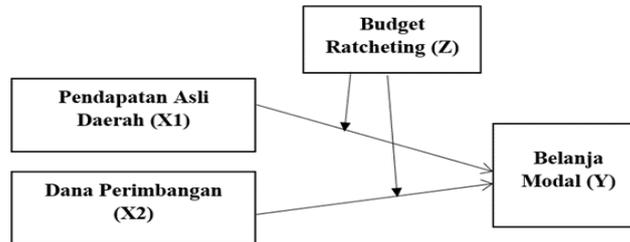
Penganggaran untuk dana perimbangan tentu saja dapat dikatakan sebagai proses dalam menentukan pendapatan target yang harus dilakukan dengan mempertimbangkan dan mempertimbangkan aturan dalam objek pendapatan khusus dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah. Marlowe (2009) lebih lanjut menjelaskan bahwa ada kecenderungan untuk anggaran besar akan dilanjutkan dengan penetapan target yang besar, dan sebaliknya, yang kemudian mengkonfirmasi argumen ini sebagai kondisi yang disebut sebagai *budget ratcheting*. Dalam penelitian Safitri dan Sari (2020) menjelaskan bahwa dalam dana perimbangan Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat terjadi efek ratchet, dan penelitian yang dilakukan oleh (Abdullah & Junita, 2016) membuktikan bahwa *ratcheting* anggaran memoderasi hubungan antara pendapatan regional dan pengeluaran. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₄: *Budget Ratcheting* Memperkuat dalam Hubungan Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal.

2. Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiyono (2016), penelitian kuantitatif adalah penelitian atau studi yang dilakukan untuk membuktikan penyebab dari suatu permasalahan dan bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Penelitian ini terdiri atas dua variabel independen (X), yang terdiri dari pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, kemudian satu jenis variabel dependen (Y), yaitu alokasi belanja modal, serta satu jenis variabel moderasi (Z), yaitu *budget ratcheting*. Berdasarkan penjelasan permasalahan penelitian, kajian teori serta hasil penelitian terdahulu yang relevan maka dapat disusun kerangka berpikir penelitian dengan model sebagai berikut:



Gamba1.Kerangka Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Dimana terdapat 8 pemerintah kabupaten dan 1 pemerintah kota yang dijadikan sampel penelitian dengan menggunakan laporan keuangan berupa APBD dan LRA yang telah disusun oleh pemerintah daerah terkait dan telah terpublikasi pada situs resmi DJPK Kemenkeu Republik Indonesia di laman <https://djpk.kemenkeu.go.id>. Populasi dari penelitian ini adalah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali berupa APBD dan LRA yang dipublikasikan dengan periode tahun 2016-2021. Penelitian ini menggunakan periode 2016-2021 untuk menjamin kelengkapan data pada APBD dan LRA Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Bali, sehingga tidak ada sampel yang tereliminasi karena adanya kemungkinan belum menyampaikan APBD dan LRA yang telah diaudit.

Dalam penelitian ini, sampel penelitian ditentukan menggunakan metode purposive sampling. Kriteria atau pertimbangan yang digunakan dalam melakukan pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai sampel merupakan pemerintah daerah kabupaten dan kota yang berada di wilayah Provinsi Bali.
- 2) Pemerintah daerah yang akan dijadikan sampel memiliki data yang tersedia lengkap untuk laporan keuangan selama 6 tahun anggaran yaitu selama kurun waktu 2016-2021 yang diperoleh pada laman: www.djpk.kemenkeu.go.id
- 3) Pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai sampel bukan berasal dari daerah pemekaran baru atau paling lambat sudah berdiri selama 6 tahun.

Atas kriteria tersebut, diperoleh total data sampel sebanyak 54 sampel.

Analisis Regresi Linier Berjenjang

Dalam membangun model penelitian, dikarenakan menggunakan efek moderasi penelitian ini menggunakan model regresi linier berjenjang dengan membangun model 2 persamaan dengan kriteria:

- Persamaan 1 :Memasukan variabel independent tanpa variabel moderasi dalam satu persamaan.
- Persamaan 2 :Memasukan variabel moderasi dan memasukan variabel independent baru yang merupakan interaksi antara variabel independent dengan variabel moderasi.

Dimana model persamaan digambarkan sebagai berikut

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon \dots\dots\dots \text{(Persamaan 1)}$$

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 (X_1 * Z) + \beta_5 (X_2 * Z) + \varepsilon \dots\dots\dots \text{(Persamaan 2)}$$

Keterangan:

Y	:	Belanja Modal
X ₁	:	Pendapatann Asli Daerah
X ₂	:	Dana Perimbangan
Z	:	<i>Budget Ratcheting</i>
A	:	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$:	Koefisien regresi yang menunjukkan perubahan variabel dependen Berdasarkan pada variabel independent
ε	:	Standar Eror

Setelah uji regresi dilakukan dalam penarikan hipotesis dilakukan uji t (parsial) dan uji koefisien determinasi R Square (R²). Tahap pengujian terakhir ialah menguji pengaruh moderasi melalui presentasi nilai R Square (R²) sebelum dan sesudah moderasi dimasukkan dalam pengujian

3. Hasil dan Pembahasan Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui nilai informasi umum mengenai data penelitian berupa nilai minimum dan maksimum masing – masing data. Berdasarkan analisis statistik deskriptif diperoleh gambaran sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Parameter	Nilai Maksimum	Nilai Minimum
(X ₁)	6.791.520.731.810	88.244.044.683
(X ₂)	1.720.277.245.845	72.651.223.000
(Z)	1.906.662.107.561	- 2.501.386.967.439
(Y)	1.603.761.628.115	82.211.432.945

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Regresi Persamaan 1

Test Statistic	0,087
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200 ^{c,d}

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Regresi Persamaan 2

Test Statistic	0,072
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,200

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Berdasarkan Tabel .2 dan 3 diatas, hasil uji statistik *One -Sample Kolmogorov Smirnov Test* tadi kedua model regresi menunjukkan nilai signifikansi sama sama di angka 0,200, dimana nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini kemudian menunjukkan atau dapat diartikan bahwa sebaran data pada semua unit analisis terdistribusi normal.

Uji Multikoleniaritas

Tabel 4. Hasil Uji Multikoleniaritas Regresi Persamaan 1

	Tolerance	VIF
PAD	0,898	1,114
Dana Perimbangan	0,924	1,082

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Tabel 5. Hasil Uji Multikoleniaritas Regresi Persamaan 2

	Tolerance	VIF
Dana Perimbangan	0,822	1,216
<i>Budget Ratcheting</i>	0,121	8,274
Interaksi Moderasi 1	0,206	4,843
Interaksi Moderasi 2	0,238	4,198

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Berdasarkan pada tabel 4 dan 5 diatas, dari keseluruhan variabel baik pada table regresi pertama maupun table regresi kedua didapatkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independent dalam regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Komponen	Nilai Sig.
Regresi Persamaan 1	PAD (X ₁)	0,124
	Dana Perimbangan (X ₂)	0,157
Regresi Persamaan 2	PAD (X ₁)	0,140
	Dana Perimbangan (X ₂)	0,538
	<i>Budget Ratcheting</i> (Z)	0,255
	Interaksi Moderasi 1 (X ₁ * Z)	0,522
	Interaksi Moderasi 2 (X ₂ * Z)	0,080

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Berdasarkan pada tabel.6, dapat diketahui dari keseluruhan variabel baik pada regresi pertama maupun kedua tidak terdapat gejala heteroskedastisitas antar variabel independent.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi memiliki tujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada t-1 (sebelumnya).

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	Nilai Durbin-Watson
Regresi Persamaan 1	1,939
Regresi Persamaan 2	1,781

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Berdasarkan pada tabel. 7 diatas, dapat diketahui penjelasan sebagai berikut:

Persamaan 1:

$$dU < dw < 4 - dU$$

$$1,6383 < 1,939 < 2,3617$$

Persamaan 2:

$$dU < dw < 4 - dU$$

$$1,7684 < 1,781 < 2,219$$

Maka sebagaimana dasar pengambilan keputusan uji *Durbin-Watson* diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah atau gejala autokorelasi baik pada model regresi pertama maupun model regresi kedua. Dengan demikian, secara keseluruhan uji asumsi klasik sudah dipenuhi

Analisis Regresi Linier Berjenjang

Analisis regresi linier berjenjang dalam penelitian ini dilakukan melalui dua model persamaan dengan *output* sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linier Persamaan 1

Parameter	B	t	Sig.
Konstanta	10.258.637,47	0.114	0,909
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	0,212	13,551	0,000
Dana Perimbangan (X ₂)	0,221	2,456	0,017

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Tabel 9. Hasil Analisis Regresi Linier Persamaan 2

Parameter	B	t	Sig.
Konstanta	1.488.429.255,37	0,021	0,984
Pendapatan Asli Daerah (X ₁)	0,218	14,975	0,000
Dana Perimbangan (X ₂)	0,200	2,728	0,009
<i>Budget Ratcheting</i> (Z)	1,209	2,682	0,010
Interaksi Moderasi 1 (X ₁ * Z)	2,674	2,701	0,009
Interaksi Moderasi 2 (X ₂ * Z)	2,256	2,249	0,029

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Berdasarkan hasil pada tabel 9 dan tabel 10 diatas, dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 10.258.517,47 + 0,212X_1 + 0,221X_2 + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 1})$$

$$Y = 1.488.429.255,37 + 0,218X_1 + 0,200X_2 + 1,209Z + 2,674(X_1 * Z) + 2,256(X_2 * Z) + \varepsilon \quad (\text{Persamaan 2})$$

Uji t (Uji Parsial)

Dalam penelitian ini uji t digunakan untuk melihat dan menarik kesimpulan atas hipotesis satu (H1) dan hipotesis dua (H2) yang diajukan dalam penelitian ini dengan melihat pada regresi persamaan pertama. Dengan hasil sebagai berikut: 1) Berdasarkan tabel hasil uji diatas, didapatkan nilai signifikansi yaitu $0,000 < 0,05$. Dan nilai thitung > ttabel yaitu $13,551 > 2,0065$. Maka hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (X₁) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sehingga dinyatakan bahwa H₁ dapat diterima. 2) Berdasarkan tabel hasil uji diatas, didapatkan nilai signifikansi yaitu $0,017 < 0,05$. dan nilai thitung > ttabel yaitu $2,456 > 2,0065$. Maka hasil ini menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan (X₂) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Alokasi Belanja Modal. Sehingga dinyatakan bahwa H₂ dapat diterima.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Pada penelitian ini analisis yang digunakan adalah *R Square* (R²). Dimana jika nilai *R Square* kecil, ini berarti kemampuan variabel – variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas.

Tabel 10. Hasil Uji Determinasi (R²)

Parameter	Nilai R Square (R ²)
Regresi Persamaan 1	0,787
Regresi Persamaan 2	0,873
Pendapatan Asli Daerah	0,762
PAD dimoderasi <i>Budget Ratcheting</i>	0,792
Dana Perimbangan	0,098
Dana Perimbangan dimoderasi <i>Budget Ratcheting</i>	0,179

Sumber: Data sekunder diolah SPSS ver.26, (2023)

Uji Pengaruh Moderasi

Berdasarkan informasi yang tertera dari hasil uji determinasi, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi 1 memiliki nilai 0,009 dimana nilai tersebut $0,009 < 0,05$. Dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,701 > 2,0065$. Kemudian nilai *R Square* pada regresi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal sebesar 0,762 atau 76,2%. Setelah ditambahkan variabel moderasi berupa interaksi 1 ($X_1 * Z$) nilai *R Square* regresi mengalami peningkatan menjadi 0,792 atau 79,3%, dimana besaran peningkatan sejumlah 0,03 atau 3%. Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa *Budget Ratcheting* berpengaruh dalam hubungan pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal dengan efek moderasi memperkuat hubungan. Maka dinyatakan H_3 diterima, Berdasarkan informasi yang tertera dari hasil uji determinasi dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel interaksi 2 memiliki nilai 0,029 dimana nilai tersebut $0,029 < 0,05$. Dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,249 > 2,0065$. Kemudian nilai *R Square* pada regresi pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal sebesar 0,098 atau 9,8%. Setelah ditambahkan variabel moderasi berupa interaksi 2 ($X_2 * Z$) nilai *R Square* regresi mengalami peningkatan menjadi 0,179 atau 17,9%, dimana besaran peningkatan sejumlah 0,081 atau 8,1%. Dari hasil ini dapat dinyatakan bahwa *Budget Ratcheting* berpengaruh dalam hubungan pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal dengan efek moderasi memperkuat hubungan. Maka dinyatakan H_4 diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil analisis data yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali di periode 2016-2021. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Ulya & Kusdiana, 2022) Hasibuan dan Tiara (2021), Setyarini dan Rustyaningsih (2021) serta (Malau et al., 2020) yang mana menemukan hasil pendapatan asli daerah berpengaruh dan memiliki korelasi positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pada kabupaten dan kota di Provinsi Bali pemerintahnya telah memiliki keberdayaan yang memadai dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. PAD yang dihasilkan oleh daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berhasil diolah untuk kepentingan publik melalui jalur peningkatan nilai alokasi modal yang selaras dengan peningkatan PAD yang diperoleh.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal

Dana hasil analisis data yang dilakukan, didapatkan hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi Belanja Modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali di periode 2016-2021. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasibuan dan Tiara (2021), Setyarini dan Rustyaningsih (2021), (Malau et al., 2020) serta (Nufus & Andra Asmara, 2017) yang mana menemukan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal. Pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2016-2021 dana transfer dari pemerintah pusat masih menjadi penyokong dalam pemenuhan belanja pemerintah. Berdasarkan data IDM 2018-2019 pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali kecuali pemerintah Kabupaten Badung masih menyandang kategori golongan menuju mandiri dan belum mandiri. Sehingga pemerintah daerah kabupaten dan kota masih mengupayakan penerimaan transfer dana untuk pemenuhan aktivitas daerah termasuk pemenuhan belanja modal yang berdampak pada peningkatan pelayanan publik.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang Dimoderasi oleh *Budget Ratcheting* terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam hubungan pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal yang dimoderasi oleh *budget ratcheting* ditemukan bahwa *budget ratcheting* memiliki sifat moderasi memperkuat pengaruh

PAD terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Bali pada periode 2016-2021. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh (Rahman, 2022), (Sari et al., 2020), (Nurhayati, 2018) serta (Abdullah & Junita, 2016) yang menyatakan bahwa *budget ratcheting* dapat memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja daerah termasuk belanja modal dalam anggaran pemerintah daerah dengan sifat moderasi memperkuat. Penelitian ini mengindikasikan bahwa bias *efek ratcheting* pada anggaran memberikan celah untuk memperkuat alokasi belanja modal melalui pentapan alokasi pendapatan asli daerah yang terpengaruh informasi varian anggaran.

Pengaruh Dana Perimbangan yang Dimoderasi oleh *Budget Ratcheting* terhadap Alokasi Belanja Modal

Dari hasil analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa dalam hubungan pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal yang dimoderasi oleh *budget ratcheting* ditemukan *budget ratcheting* dapat memiliki sifat moderasi yang memperkuat pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal pada anggaran pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali di periode 2016-2021. Wiraswasta et al., (2019) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara dana transfer dari pemerintah dengan alokasi belanja daerah baik jangka panjang maupun jangka pendek. Penerimaan ini kemudian menghasilkan respon pemerintah daerah yang cenderung *non-linier* dan *asymmetric* dikarenakan kenijakan atas dana transfer yang diterima dapat disesuaikan atau *diadjusted*. Kondisi ini menjadikan pemerintah akan mengupayakan agar pemerintah pusat tetap mengalokasikan dana perimbangan yang nilainya tetap atau meningkat untuk setiap periodenya agar prosi belanja juga ikut terpenuhi dan mengalami peningkatan.

4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini ialah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2016-2021. Dana perimbangan berpengaruh positif signifikan terhadap alokasi belanja modal pada APBD pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2016-2021. Budget Ratcheting sebagai pemoderasi memiliki sifat moderasi memperkuat hubungan pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2016-2021 serta Budget Ratcheting sebagai pemoderasi memiliki sifat moderasi memperkuat hubungan pengaruh dana perimbangan terhadap alokasi belanja modal pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Bali periode 2016-2021

Berdasarkan dari hasil pembahasan dalam penelitian serta simpulan yang telah dikemukakan, maka Adapun saran yang dapat diberikan ialah (1) Bagi pemerintah daerah kabupaten dan kota diharapkan agar mampu lebih memperhatikan besaran alokasi belanja modal dalam anggaran, serta dapat terus menjaga kestabilan penerimaan daerah terutama pada bagian PAD sehingga dapat memperkecil porsi dana perimbangan yang mana akan berdampak pula pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan publik di daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali. (2) Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat memiliki variabel yang lebih lengkap dan lebih detail serta diharapkan agar dapat menggunakan lingkup penelitian yang lebih luas baik lingkup regional maupun nasional dan dapat menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dan komprehensif dalam mengukur bias perilaku *budget ratcheting* misalnya dengan menggunakan metode campuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai bias perilaku dalam penyusunan anggaran

Daftar Pustaka

Abdullah, S., & Junita, A. (2016). Bukti Empiris Tentang Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Sendiri Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Modus*, 28(2), 185. <https://doi.org/10.24002/modus.v28i2.850>

- Anjeli, C., & Mulyani, E. (2020). Analisis Efek Ratcheting Pada Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Kabupaten/ Kota Di Provinsi Sumatera Barat, Riau Dan Jambi Tahun 2015-2018. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3468–3484. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i4.296>
- Calen, C., Agustian, C., Damanik, A. H., & Tannuary, A. (2019). Prosedur Pengelolaan Produk Deposito pada PT. BPRS Amanah Bangsa. *Owner*, 3(1), 154–161. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.76>
- Hasibuan, N. F. G., & Tiara, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 4(2), 127-140.
- Malau, E. I., Calen, C., Siregar, V. M. M., & Saragih, K. Y. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Owner*, 4(1), 356–361. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.168>
- Nufus, H., & Andra Asmara, J. (2017). Pengaruh Pendapatan Sendiri Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Dana Otonomi Khusus Sebagai Pemoderasi Pada Kab/Kota Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2(3), 1.
- Nurarifah, R., Afrizal, & L, T. A. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Merangin. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(2), 93–104. <https://online-journal.unja.ac.id/jaku/article/view/16245>
- Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah terhadap belanja modal di kabupaten/kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1), 43–59. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- Nurhayati, N. (2018). Pengaruh Budget Ratcheting Terhadap Hubungan Antara Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Wilayah Iii Cirebon. *Jurnal Riset Keuangan Dan Akuntansi*, 4(1), 29–32. <https://doi.org/10.25134/jrka.v4i1.1429>
- Rahman, K. G. (2022). Budget Ratcheting pada Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Sekretariat DPRD Kabupaten Barru. *IMPREST: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–7. <https://doi.org/10.37476/imprest.v1i1.2971>
- Sari, V. F., Arza, F. I., & Syafitri, A. A. (2021). Analisis Fenomena Anggaran Bergeser di Propinsi. 192(Piceeba), 56–64.
- Sari, V. N., Suhairi, S., & Syofriyeni, N. (2020). Efek Ratchet terhadap Anggaran Pemerintah Daerah: Studi pada Pemerintah Kota Se Sumatera. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 183. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.844>
- Setiawan, R., & Achyar, A. (2013). Effects of Perceived Trust and Perceived Price on Customers' Intention to Buy in Online Store in Indonesia. *ASEAN Marketing Journal*.
- Ulya, S., & Kusdiana, S. E. D. (2022). Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Asean (Studi Kasus 7 Negara [http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60607%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/60607/1/Skripsi BAB I-III %28salsafirah%29.pdf](http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/60607%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/60607/1/Skripsi%20BAB%20I-III%20salsafirah%29.pdf)
- Wiraswasta, F., Pudjihadjo, M., & Adis, P. M. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.26905/jbm.v5i2.2390>